

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komplek Vijaya Kusuma yang berada di Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung di bangun pada tahun 1986, penamaan Vijaya Kusuma sebelum nama itu digunakan nama sebelumnya yaitu kampung Cigagak Kecamatan Cipadung. Nama Vijaya Kusuma yang dibawa oleh seorang pengembang yang bernama Letnan Palimbong mereka mendirikan perumahan yang dikhususkan untuk pensiunan karyawan Sipil baik Militer di lingkungan Ajudan Jendral (AJEN), ditempat itu ada suatu permasalahan tanah yang dibebaskan adalah tanah hak milik masyarakat kampung Cigagak Kecamatan Cipadung, setelah perumahan itu didirikan ternyata konsumen perumahan tersebut dapat memenuhi persyaratan dalam mengambil perumahan di Vijaya Kusuma, dengan menggunakan pembayaran tunai dan kebanyakan masyarakat membayar dengan mencicil melalui Bank.

Vijaya Kusuma diambil dari Lambang Tentara Angkatan Darat Kota Bandung, seperti diantaranya Lambang Kodam 6 Siliwangi, oleh Letnan Palimbong mengambil nama Vijaya Kusuma itu merupakan kebanggaan atau sebutan dari salah satu Instansi Angkatan Darat, yang berada di Bandung dan Letnan Palimbong itu berdomisili di Bandung maka dia menggunakan nama Vijaya Kusuma itu asli dari Bandung. Sebutan nama Vijaya Kusuma adalah sebagai hobi atau dibawa oleh pengembang memang ada kaitannya dengan Instansi terkait.

Berkaitan dengan wakaf yang terjadi di daerah Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung tepatnya di perumahan Vijaya Kusuma yang terletak di Rw. 6, orang yang mewakafkan bernama bapak Deepak Rupo Chaugani dia pemeluk Agama Hindu dan beliau mewakafkan hartannya sebidang harta bendanya yang berupa tanah seluas 1.740,72 m². Dengan batasan-batasan: 1. Sebelah Timur yaitu rumah Bapak Jojon, 2. Sebelah Barat yaitu rumah Bapak Bagyo, 3. Sebelah Utara yaitu Goma Gor Manglayang, 4. Sebelah Selatan rumah Nur Kholisoh, dengan Nomor Sertifikat atau Persil HM. 161.

Tanah wakaf tersebut sudah terdapat bangunan yang berbentuk Masjid dan Masjid tersebut menjadi salah satu tempat ibadah yang digunakan oleh masyarakat baik untuk keagamaan maupun untuk sarana pendidikan, hal ini membuktikan bahwa masyarakat perumahan Vijaya Kusuma Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung, menyadari bahwa Islam adalah Agama yang paling baik dan benar. Dalam masalah keagamaan, di perumahan Vijaya Kusuma Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung semakin berkembang dengan diadakannya pengajian rutin mulai dari Bapak-bapak, Ibu-ibu bahkan kaum muda sekalian. Ada suatu permasalahan dikalangan masyarakat dan ketidak setujuan masyarakat mengenai orang non muslim dalam mewakafkan hartannya untuk dipergunakan oleh orang muslim, sebagaimana dalam penjelasan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa *wakif* perorangan adalah warga Negara Indonesia ataupun warga Negara Asing, *Wakif* organisasi adalah organisasi Indonesia atau Asing, dan *wakif* badan hukum adalah badan hukum Indonesia atau Asing. Dengan demikian, orang

Asing, organisasi Asing, dan badan hukum Asing dapat mewakafkan hartannya di Indonesia.

Sebagaimana yang ada dalam syarat-syarat *wakif* tidak ada ketentuan yang mengharuskan seorang *wakif*, harus warga Negara Indonesia. Dengan kata lain, orang Asing pundapat mewakafkan harta benda miliknya di Indonesia, dan *wakif* tidak mesti beragama Islam. Dengan kata lain, penganut Agama lain bahkan orang yang tidak beragama Islampun diperbolehkan mewakafkan sebagian harta benda miliknya. Didalam Buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam.¹ juga tidak dijelaskan bahwasannya orang yang berwakaf itu harus orang muslim saja tetapi orang non muslim saja bisa, seperti kita lihat didalam rukun wakaf didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwasannya didalam rukunya harus ada orang yang mewakafkan hartanya (*wakif*), harus ada harta yang diwakafkan (*mauquf*), harus ada ijab kobul (*shighah*) dan tujuan wakaf (*mauquf'alaiah*).

Peranan wakaf sangat penting dan startegis bagi perkembangan masyarakat muslim sepanjang masa, baik menyangkut masalah pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan.sebab, hakekat kehidupan manusia sepanjang masa adalah menyangkut ketiga aspek tersebut. Ia menjadi pilar pembangunan manusia karena didalamnya

1 Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), h. 13.

terdapat unsur penting yang tidak dapat ditinggalkan, unsur pendanaan (*finance*) salah satu faktor penting dalam kehidupan sekarang ini.²

Berdasarkan hakikat berwakaf sangat berat, maka penghargaan tentang wakafpun sangatlah besar, walaupun *wakifnya* telah meninggal dunia, semakin berat amal perbuatan yang dilakukan, semakin besar pula pahala yang akan diterima. Demikian pula semakin ringan suatu ibadah dikerjakan, maka semakin kecil pula pahala yang akan diperoleh. Maka benda wakaf harus bersifat kekal zatnya, seperti tanah, bangunan dan yang lainnya. Banyak ulama yang memandang terutama Imam Syafi'i bahwa prinsip keabadian yang ada pada wakaf itu merupakan perbuatan *shadaqah jariyah* yang pahalannya terus menerus mengalir meskipun *wakif* telah meninggal, selagi harta itu bermanfaat.

Kesadaran hukum yang ada dimasyarakat merupakan hal yang sangat penting dan menentukan berlakunya suatu hukum didalam masyarakat dengan ada harta wakaf, yaitu harta yang keluar dari pemiliknya yaitu si *wakif*. Jadilah harta wakaf tersebut secara hukum milik Allah SWT. Bagi si *wakif* yang terhalang untuk memanfaatkannya maka wajib mendermakan hasilnya sesuai tujuan.

Manfaat wakaf sangat besar bagi pembangunan umat, namun tidak sedikit yang mengundang permasalahan yang muncul terkait dengan perwakafan di beberapa lembaga keuangan, kependidikan, kesehatan, ekonomi, banyak dijumpai penggunaan harta wakaf yang tidak sesuai dengan tujuan yang semula. Pengelolaan lembaga

² Muhammad Nurdin, *Memahami Hadis Wakaf dalam Konstalasi Masyarakat Global*, JISWAF: Zakat dan Wakaf, (Vol. 2, No. 1, Juni 2015), h. 1.
 Stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf.http://journal.

perwakafan yang tidak transparan. Permasalahan ini dikalangan umat. Pelaksanaan mengenai wakaf memiliki potensi yang baik, perwakafan dalam prakteknya dilapangan masih dihadapkan pada beberapa permasalahan dalam pengelolannya. Dengan berkembangnya teknologi, kultur budaya dan transformasi pemikiran manusia yang menyebabkan kehidupan antara umat beragama bergeser kearah yang lebih dinamis.

Sebagaimana dilihat dari sisi yang lain, dalam tinjauan hukum Islam, wakaf sendiri tidak ada sumber hukum utama yang mengkaji secara objektif hukum perwakafan. Ketika Nabi di Madinah tidak ada penjelasan bagaimana hukum wakaf secara praktek didalam kehidupan. Kemudian pada perkembangan Islam, para ulama melakukan ijtihad untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan wakaf secara objektif. Saat kehidupan umat beragama Islam berkembang dengan sedemikian majunya, dengan semangat toleransi sosial yang baik, dengan adanya perwakafan didalam Islam dihadapan dengan beberapa kendala dan permasalahan yang terkait dengan pengelolaan wakaf dalam membangun kemaslahatan. Tidak terlepas dari halitu, rasa toleransi dan saling membantu antar beragama memberikan beberapa dampak atau permasalahan yang timbul dari masyarakat, salah satunya yaitu seperti pemberian harta dalam bentuk wakaf dari orang non muslim untuk dipergunakan oleh orang Islam.

Kebiasaan berwakaf secara tradisional ini pada akhir-akhir ini mulai diuji. Ini sejalan dengan munculnya pihak-pihak tertentu yang ingin menyalah gunakan atau mengalihfungsikan harta benda wakaf yang biasa dilaksanakan sejak dahulu

adalah hanya dengan mempertimbangkan Agama semata tanpa diiringi dengan bukti tertulis. Karena pelaksanaan wakaf tidak melalui bukti tertulis, maka dikhawatirkan terjadi gugatan atau beralih fungsi. Dan akhirnya setatus wakaf kabur.³

Beberapa kalangan ulama masih belum jelas dalam menentukan hukum wakaf dan untuk mengambil langkah dari suatu kejadian seperti demikian. Atau bagaimana diperlukan solusi alternatif dari hal tersebut tanpa menyebabkan sesuatu yang kurang efisien pada masyarakat umum dan pada umat Islam itu tersendiri untuk membangun kemaslahatan.

Keadaan yang sudah seperti ini sepatutnya sudah perlu mendapat perhatian dari para kalangan ulama, sehingga mampu mendorong perkembangan dalam pengelolaan perwakafan kearah yang lebih sempurna. Selain itu juga, harus diperbaiki juga nilai-nilai produktivitas dari wakaf itu sendiri yang tidak lain adalah visi dan misi perwakafan. Dan didalam Undang-Undang maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak tercantum bahwasannya syarat yang mewakafkan itu harus orang muslim sedang didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di dalam Buku ke III Tentang Perwakafan BaB II Dasar-dasar wakaf, bagian ke Empat, Pasal 7 menjelaskan bahwa *wakif* meliputi, perseorangan, organisasi dan badan hukum, yang dimaksud dengan *wakif* perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan, yang pertama yaitu:

3 Ahmmad Dzajuli, *Fiqih Syiasah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 238.

dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf.⁴

Wakaf organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Wakaf badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Begitupula didalam hukum fiqh tidak tercantuk bahwasannya wakaf itu tidak diperuntukan bagi orang muslim saja tetapi orang non muslim saja boleh untuk melakukan wakaf tersebut asalkan dengan sukarela dan tidak ada paksaan atau dalam keadaan tekanan. wakaf beda agama yang disebut juga dengan wakaf non muslim. Sedangkan fenomena yang ada dilapangan adalah non muslim (Hindu) mewakafkan tanahnya untuk kepentingan sosial, namun didalam tanah tersebut sudah ada bangunan Masjid diatas lahan tanah wakaf tersebut.

Sebagaimana yang terdapat didalam agama non muslim (Hindu) sendiri tidak ada yang disebut wakaf, namun dalam agama hindu sendiri ada yang namanya persembahan atau juga pemberian. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama yang masing-masing konsisten pada pendapatnya sendiri.

⁴ Anonimous, *Undang-undang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2013), h. 164.

Mengenai wakaf non muslim ada beberapa ulama yang berbeda pendapat mengenai wakaf dari non muslim tersebut. Menurut pandangan madzhab Hanafi wakaf seorang muslim atau non muslim, sah hukumnya jika wakaf non muslim tersebut memenuhi syarat yang ditetapkan oleh madzhab Hanafi dari agama atau ras apapun. Selaras dengan itu, tindakan apapun yang memberikan manfaat kemanusiaan, secara umum bisa dinggap sebagai wakaf yang sah dan tindakan seperti ini adalah sebuah tindakan *universal* yang tidak bertentangan dengan ajaran agama manapun. Sebab menyumbangkan harta pada tujuan seperti diatas adalah amal kebaikan dan *taqarrub* dalam hukum Islam, baik dari seseorang muslim ataupun dari non muslim.⁵

Madzhab Hanafi juga berpendapat bahwa wakaf untuk Masjid atau sejenisnya, sah hukumnya jika berasal dari orang muslim saja, sebab mengeluarkan dana untuk Masjid adalah sebuah tindakan sedekah *taqarrub* dalam hukum Islam yang dikhususkan bagi muslim saja. Bagi non muslim tindakan seperti itu tidak sah hukumnya, karena tindakan seperti itu tidak diniatkan *taqarrub* oleh mereka. Oleh karena itu, jika ada seorang non muslim (Kristen) yang mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun Masjid dan kaum muslimin shalat didalamnya selama bertahun-tahun maka dia berhak merobohkan Masjid tersebut kapanpun dan menggunakan tanahnya sesuai keinginannya. Sebagaimana halnya, para ahli waris setelah kematian si *wakif* boleh membagikan tanah tersebut diantara mereka, seperti harta miliknya yang lain karena wakafnya itu tidak sah.⁶

⁵ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturrahman, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republik dan Liman, 2004), h. 298.

⁶ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturrahman, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republik dan Liman, 2004), h. 296.

Menurut pemikiran madzhab Maliki, sah hukumnya wakaf dari seorang muslim kepada semua syiar Islam dan badan-badan sosial umum. Madzhab Maliki juga menjelaskan tentang wakaf non muslim yang ditunjukkan ke Masjid dan ke syiar-syiar Islam.⁷ Disini Imam Malik menjelaskan bahwa orang non muslim wakafnya dianggap tidak sah bila wakafnya tersebut akan dibangun Masjid. Menurut ulama kalangan madzhab Syafi'i sebagaimana telah terdekomentasikan dalam kitab *Fathul Wahhab* syarat pemberian wakaf adalah pihak yang dalam nyata-nyatannya tidak dalam tekanan (*al-mukhtar*). Dengan kata lain ia adalah pihak yang suka rela memberikan harta bendanya untuk diwakafkan disamping itu juga sebagai orang yang memiliki kecakapan dalam berbuat kebajikan (*ahlu tabarru*).

Menurut Imam Syafi'i, yang dimaksud dari "memakmurkan Masjid" yang dilarang adalah jika orang non muslim itu mempunyai kekuasaan penuh atas urusan Masjid (menjadi takmir misalnya), atau dikhawatirkan akan dilaksanakan perbuatan syirik didalam Masjid. Jika tidak ada unsur-unsur seperti itu, maka menerima sumbangan dari non muslim untuk pembangunan Masjid adalah boleh (*mubah*). Ini merupakan pendapat ulama madzhab Syafi'i.

Wakaf merupakan salah satu perbuatan hukum sudah melembaga dan di praktekan di Indonesia pengaturan tentang sumber hukum, tata cara, prosedur, dan praktek perwakafan dalam bentuk peraturan yakni sejak tahun 1960 dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok-pokok agama, peraturan

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Djendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), h. 21.

pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebarluaskan dengan IMPRESS Nomor 1 tahun 1991, Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dan peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.⁸

Disyaratkan pihak yang memberi wakaf adalah ia orang yang secara sukarela dalam memberikannya (*mukhtar*), dan penjelasan tambahan dari penulis dalam hal ini adalah ia merupakan harus ahlu tabarru' (orang yang cakap dalam kebajikan). Karenanya sah wakaf dari orang non muslim dan walaupun wakaf tersebut untuk Masjid.

Mengenai persyaratan yang diajukan terkait pemberian wakaf tidak menyebutkan bahwasannya ia harus seorang muslim. Konsekuensinya adalah keabsahan wakaf dari non muslim. Sebab, tidak ada pernyataan harus seorang muslim. Karena itu kemudian dengan tegas Syekh Zakariyah Al-Anshari dalam *Fathul Wahhab*-nya menyatakan keabsahan wakaf non muslim meskipun untuk Masjid.

Adapun bila wakaf tersebut untuk pembangunan Masjid, Syafi'iyah dan Hanafiyyah tetap membolehkan, sedangkan Malikiyyah dan Hanabilah mengatakan tidak sah.

B. Rumusan Masalah

⁸ H. Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 2007), h. 165.

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka diketahui bahwa di Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung, telah terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan hukum wakaf dari pemberian dari orang non muslim, para toko agama sudah berbeda pendapat dalam memahami suatu hukum wakaf tanah untuk Masjid pemberian ini, penulis menjelaskan parangrap di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat ulama Nu dan Muhamadiyah Tentang Wakaf dari Non Muslim di Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung?
2. Bagaimana dasar hukum yang digunakan ulama Nu dan Muhamadiyah Tentang Wakaf dari Non Muslim di Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung?
3. Faktor-Faktor yang mendorong *wakif* dalam mewakafkan tanahnya di Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pendapat ulama Nu dan Muhamadiyah Tentang Wakaf dari Non Muslim di Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung
2. Untuk mengetahui Bagaimana dasar hukum yang digunakan ulama Nu dan Muhamadiyah Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung dalam menentukan status hukum wakaf dari non muslim
3. Untuk mengetahui apa Faktor-Faktor yang mendorong *wakif* dalam mewakafkan tanahnya di Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung

D. Kegunaan Penelitian

penelitian ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis pribadi untuk menambah wawasan tentang pendapat ulama Nu dan Muhammadiyah Tentang Wakaf dari Non Muslim di Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

Bahwa penelitian ini bersifat ilmiah, maka harapan penulis tindak hanya berguna dan bermanfaat bagi penulis semata, akan tetapi juga memberikan kegunaan-kegunaan antara lain:

- a. Secara teoritis: memberikan kontribusi pemikiran ilmiah, penjelasan, serta pemahaman dan sebagai bahan informasi akademis dalam usaha mengembangkan keilmuan mengenai pendapat ulama Nu dan Muhammadiyah Tentang Wakaf dari Non Muslim di Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
- b. Secara praktis: memberikan manfaat bagi masyarakat untuk menjawab permasalahan khususnya dalam pendapat ulama Nu dan Muhammadiyah Tentang Wakaf dari Non Muslim di Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk memberikan gambaran arahan penelitian ini agar menghindari kesalahan, maka peneliti kemudian memberikan pengertian atau definisi operasional yang terkandung dalam judul dan permasalahan yang peneliti akan kaji dalam skripsi ini dengan menggunakan teori studi literatur cara untuk menyelesaikan persoalan dengan cara menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya, sebagaimana judul “Pendapat Ulama Nu dan Muhammadiyah Tentang Wakaf dari Non Muslim di Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung”. Dari judul ini

penulis memberikan pengertian bahwa wakaf berarti menahan perpindahan milik suatu harta bermanfaat dan tahan lama.

Sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT. Dari pandangan beberapa ulama dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah yang sekaligus mampu mendorong peningkatan perekonomian umat. Para ulama madzhab fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan. Mengenai wakaf non muslim ada beberapa ulama yang berbeda pendapat mengenai wakaf dari non muslim tersebut. Menurut pandangan madzhab Hanafi wakaf seorang muslim atau non muslim, sah hukumnya jika wakaf non muslim tersebut memenuhi syarat yang ditetapkan oleh madzhab Hanafi dari agama atau ras apapun. Selaras dengan itu, tindakan apapun yang memberikan manfaat kemanusiaan, secara umum bisa dinggap sebagai wakaf yang sah dan tindakan seperti ini adalah sebuah tindakan *universal* yang tidak bertentangan dengan ajaran agama manapun. Sebab menyumbangkan harta pada tujuan seperti diatas adalah amal kebaikan dan *taqarrub* dalam hukum Islam, baik dari seseorang muslim ataupun dari non muslim.⁹

Madzhab Hanafi juga berpendapat bahwa wakaf untuk Masjid atau sejenisnya, sah hukumnya jika berasal dari orang muslim saja, sebab mengeluarkan dana untuk Masjid adalah sebuah tindakan sedekah *taqarrub* dalam hukum Islam yang dikhususkan bagi muslim saja. Bagi non muslim tindakan seperti itu tidak sah

⁹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturrahman, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republik dan Liman, 2004), h. 298.

hukumnya, karena tindakan seperti itu tidak diniatkan *taqarrub* oleh mereka. Oleh karena itu, jika ada seorang non muslim (Kristen) yang mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun Masjid dan kaum muslimin shalat didalamnya selama bertahun-tahun maka dia berhak merobohkan Masjid tersebut kapanpun dan menggunakan tanahnya sesuai keinginannya. Sebagaimana halnya, para ahli waris setelah kematian si *wakif* boleh membagikan tanah tersebut diantara mereka, seperti harta miliknya yang lain karena wakafnya itu tidak sah.¹⁰

Menurut pemikiran madzhab Maliki, sah hukumnya wakaf dari seorang muslim kepada semua syiar Islam dan badan-badan sosial umum. Madzhab Maliki juga menjelaskan tentang wakaf non muslim yang ditunjukan ke Masjid dan ke syiar-syiar Islam.¹¹ Disini Imam Malik menjelaskan bahwa orang non muslim wakafnya dianggap tidak sah bila wakafnya tersebut akan dibangun Masjid.¹² dalam penjelasan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa *wakif* perorangan adalah warga Negara Indonesia atau Negara Asing, *Wakif* organisasi adalah organisasi Indonesia atau Asing, dan *wakif* badan hukum adalah badan hukum Indonesia atau Asing. Dengan demikian, orang Asing, organisasi Asing, dan badan hukum Asing dapat mewakafkan hartannya di Indonesia. Dalam hal syarat-syarat *wakif* tidak ada ketentuan yang mengharuskan seorang *wakif*, harus warga Negara Indonesia. Dengan kata lain, orang Asing pundapat mewakafkan harta benda miliknya di Indonesia, dan

¹⁰ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturrahman, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republik dan Liman, 2004), h. 296.

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Djendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), h. 21.

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Djendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), h. 21.

wakif tidak mesti beragama Islam. Dengan kata lain, penganut Agama lain bahkan orang yang tidak beragama Islampun diperbolehkan mewakafkan sebagian harta benda miliknya. Dan didalam Undang-undang maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak tercantum bahwasannya syarat yang mewakafkan itu harus orang muslim sedangkandidalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di dalam Buku ke III Tentang Perwakafan BaB II Dasar-dasar wakaf, bagian ke Empat, Pasal 7 menjelaskan bahwa *wakif* meliputi, perseorangan, organisasi dan badan hukum, yang dimaksud dengan *wakif* perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan, yang pertama yaitu: dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf.¹³

F. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka yang dimaksud adalah upaya untuk memberikan penjelasan bahwa obyek penelitian yang di lakukan penyusunan memiliki signifikan yang sedemikian rupa secara intelektual akademik disertai data pendukung yang memadai dan juga belum pernah diteliti secara tuntas, detail dan menyeluruh, baik yang berupa skripsi ataupun bentuk-bentuk penelitian yang lainnya.

Penelitian yang berbentuk skripsi misalnya pernah dilakukan oleh Ikbil Muhamad Maftuh dengan judul “*Tukar Ganti Wakaf Madrasah Al-Maghfirah di Kelurahan Kaler Kabupaten Purwakarta*”. Dalam pembahasan skripsi ini Ikbil

¹³ Anonymous, *Undang-undang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2013), h. 164.

Muhamad Maftuh mengulas lebih ketukar ganti wakaf nya.¹⁴ Muhamad Gufran dalam skripsinya yang berjudul “*Pandangan Madzhab Hanafi dan Maliki Terhadap Hukum Wakaf Bagi Non Muslim dalam Kaitannya dengan Fiqh Kontenforer*”. Skripsi ini lebih membahas ke pendapat ulama madzhab dan ulama kontenforer dalam menentukan hukum tentang wakaf bagi orang non muslim.¹⁵

Sri Sulastri dalam skripsinya yang berjudul “*Perubahan Peruntukan Benda Wakaf Menurut Pendapat Muhamad Bin Idris dan Abu Hanifah Serta Relevansinya Dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*”, skripsi ini membahas tentang bagaimana hukum perubahan benda wakaf menurut Muhamad bin Idris dan Abu Hanifah dan bagaimana relevansinya dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Perubahan Peruntukan Benda Wakaf.¹⁶ Skripsi ini yang ditulis oleh Rizal Firdaus dengan judul “*Penggantian Nadzir Wakaf di Kecamatan Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung*”. Pembahasan dalam skripsi ini terfokus dalam proses pergantian nadzir dalam pelaksanaan wakaf.¹⁷ Edrow Pramudya dalam skripsinya yang berjudul “*Status Hukum Ikrar Wakaf Tanpa Kehadiran Nadzir Di KUA Kiaracondong*”. Didalam skripsi ini penulis lebih membahas kepada bgaimana

¹⁴ Ikbal Muhamad Maftuh, “*Tukar Ganti Wakaf Madrasah Al-Mangfirah di Kelurahan Kaler Kabupaten Purwakarta*”. (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2014.

¹⁵ Muhamad Gufran, “*Pandangan Madzhab Hanafi dan Maliki Terhadap Hukum Wakaf Bagi Non Muslim dalam Kaitannya dengan Fiqh Kontenforer*”. (Perbandingan Madzhab dan Hukum), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Makasar: Universitas Islam Negri Alaludin Makasar, 2015.

¹⁶ Sri Sulastri, “*Perubahan Peruntukan Benda Wakaf Menurut Pendapat Muhamad Bin Idris dan Abu Hanifah Serta Relevansinya Dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*”, (Perbandingan Madzhab dan Hukum), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2015.

¹⁷ Rizal Firdaus, “*Penggantian Nadzir Wakaf di Kecamatan Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung*”. (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2013.

proses pelaksanaan wakaf dan bagaimana jika nadzir terhalang dalam pelaksanaan ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kiaracondong Bandung.¹⁸

Dalam jurnal yang ditulis oleh Muhammad Nurudin, M.Ag. yang berjudul “*Memahami Hadis Wakaf Dalam Konstalasi Masyarakat Global*”. Lebih menjelaskan bagaimana konsep wakaf oleh para ulama dengan benar, perintah menahan benda, dimanfaatkan untuk kepentingan umum, dipus dari kepemilikan, dan barangnya tidak mudah rusak. Nomenklasi dalam hukum Islam perlu dikembangkan secara terus menerus, sebagaimana apa yang telah dirintis khalifah Umar dulu, sebab perkembangan peradaban manusia selalu berjalan yang tidak akan berhenti.¹⁹ Ahmad Suwaidi dalam jurnalnya yang berjudul “*Wakaf dan Penerapannya di Negara Indonesia*”. Menjelaskan didalamnya terkait seputar sejarah wakaf, pengertian dan hukum wakaf, dan rukun wakaf.²⁰

Berdasarkan referensi diatas sudah banyak yang membahas tentang masalah wakaf, seperti sertifikasi wakaf, pengalih pungsian benda wakaf dan yang lainnya. Namun, pada penelitian tugas akhir ini yang dilakukan penulis membuat penelitian yang berjudul Pendapat Ulama Nu dan Muhamadiyah Tentang Wakaf dari Non Muslim di Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung, penelitian ini nantinya lebih menekankan kepada metodologi ulama Nu dan Muhamadiyah Tentang

¹⁸ Edrow Pramudya, ”*Status Hukum Ikrar Wakaf Tanpa Kehadiran Nadzir Di KUA Kiaracondong*”. (Al-Ahwal Al-Syakhsyah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2011.

¹⁹ Muhammad Nurudin, “Memahami Hadis Wakaf Dalam Konstalasi Masyarakat Global”. *JISWAF: Zakat dan Wakaf*, (Vol. 2, No. 1, Juni 2015), h. 114. Stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf.<http://jurnal>.

²⁰ Ahmad Suwaidi, “Wakaf dan Penerapannya di Negara Indonesia”. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, (Vol. 1. No. 2, 2011), h. 1-8. <http://www.jstor.org/stable/1571046>.

Wakaf dari Non Muslim di Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Dan bagaiman supaya mengetahui dasar hukum dan metodologi yang digunakan, faktor dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wakaf tanah untuk Masjid yang hasil pemberian dari orang non muslim. Dengan demikian meskipun penelitian ini dilakukan untuk sebuah tugas akhir tetapi mengandung kebaruan (*novelty*) yang memadai.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian secara garis besar mencakup: penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang akan dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, cara pengumpulan data yang akan di gunakan, dan cara pengelolaan dan analisis data yang akan ditempuh. Langkah-langkah ini tergantung pada masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.²¹ Adapun langkah-langkah penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode peneliti

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*). Studi kasus biasanya digunakan dibidang antropologi dan sosiologi mikro untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Satuan analisis itu dapat berupa seorang tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan atau suatu

²¹ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 57.

komunitas. Yang diutamakan dalam metode ini adalah suatu satuan analisis itu, bukan generalisasi dari sejumlah satuan analisis.²²

Dalam penelitian ini, analisis tersebut dititik beratkan pada proses Pendapat Ulama Nu dan Muhammadiyah Tentang Wakaf dari Non Muslim di Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

2. Sumber data

- a. Sumber data primer: yaitu sumber data pokok. Data yang sumber dari ulama Nu dan Muhammadiyah Tentang Wakaf dari Non Muslim di Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung, nadzir dan toko masyarakat yang ikut langsung dan menyaksikan bagaimana proses perwakafan dan pengelolaan wakaf dari non muslim di Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
- b. Sumber data sekunder: yaitu mendapatkan jurnal data tambahan sebagai pelengkap dari primer yang didapatkan dari buku-buku dan atau tulisan yang sesuai dan menunjang penelitian ini, yaitu buku-buku, jurnal, skripsi, dan yang lainnya yang membahas tentang perwakafan dan proses perwakafan.

3. Jenis data

²² *Ibid.*

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis data yang digunakan kualitatif, yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan.²³

- a. Historis, geografis dan yuridis perumahan Vijaya Kusuma Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung
 - b. Pendapat ulama Nu dan Muhamadiyah Tentang Wakaf dari Non Muslim di Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung
 - c. Dasar hukum yang digunakan ulama Nu dan Muhamadiyah Tentang Wakaf dari Non Muslim di Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung dalam menentukan status hukum wakaf dari non muslim
 - d. Faktor yang mendorong wakif dalam mewakafkan tanahnya di Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung
 - e. Tinjauan hukum wakaf Islam terhadap masalah pemberian wakaf oleh non muslim
4. Pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan , empat langkah pengumpulan data, yaitu: pertama obsevasi, wawancara atau studi lapangan, studi perpustakaan dan dokumentasi. Adalah pengumpulan data yang bersumber pada temuan-temuan dan wawancara kepada ulama Nu dan Muhamadiyah, tokoh-tokoh masyarakat di lapangan:

- a. Observasi, dalam teknik pengumpulan data ini dengan cara meneliti, mengamati, serta mencatat secara langsung terhadap obyek yang akan di teliti, obsevasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuatu

²³ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 63.

dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keadalan (*reliabilitas*) dan keshahihannya (*validitasnya*).

- b. Wawancara, dalam teknik pengumpulan data ini maka mencari data dengan wawancara, adapun metode yang paling tepat untuk memperoleh data adalah dengan wawancara (*deep interview*) dengan para ulama Nu dan Muhamadiyah, nadzir dan tokoh-tokoh masyarakat yang mengikuti proses perwakafan di Kelurahan Cipadung Deasa Cibiru Kota Bandung.
 - c. Kepustakaan (*library research*): yaitu buku-buku yang berkaitan dengan hukum perwakafan, buku-buku hukum Islam (*fiqh*) yang membahas perwakafan, Undang-undang serta Peraturan Pemerintah yang membahas tentang perwakafan.
 - d. Studi dokumentasi, yaitu studi dokumentasi atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait obyek penelitian, dalam studi dokumentasi, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis obyek peneliti serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.
5. Analisis data

Metode analisis data yang akan digunakan adalah metode analisis data kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan, memeriksa kelengkapan, dan kejelasan data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif dan dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga akan diketahui cara pemecahannya dan ditentukan hasil akhir

dari penelitian tersebut, selanjutnya akan dianalisis yaitu dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengklasifikasi semua data yang terkumpul baik yang didapat melalui observasi, wawancara maupun yang bersumber dari buku-buku dan studi dokumentasi yang berhubungan dengan obyek proses sehingga menjadi lebih spesifik.
- b. Menelaah semua data Tentang Pendapat Ulama Nu dan Muhamadiyah Tentang Wakaf dari Non Muslim di Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung yang sudah terkumpul.
- c. Mengelompokan data dalam satu-satuan sesuai dengan masalah pendapat ulama Nu dan Muhamadiyah Tentang Wakaf dari Non Muslim di Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
- d. Menghubungkan data dari teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- e. Mengambil kesimpulan dari data-data yang dianalisis.